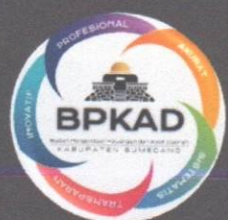


PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga Bulan September tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 yang dihadiri Tim Penyusun, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah, *terlampir*.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

<i>Kesatu</i>	:	Sistematika Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah memuat: 1) program, kegiatan dan sub kegiatan; 2) lokasi kegiatan; 3) indikator kinerja; dan 4) pagu indikatif dan prakiraan maju;
<i>Kedua</i>	:	Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dengan prakiraan target Tahun 2022 yang diestimasikan;
<i>Ketiga</i>	:	Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 yang telah diverifikasi akan dijadikan lampiran Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Sub Bagian Program



YOSEP DEDE SULAEMAN, SS., M.Si
NIP. 19790511 201001 1 002

Tim Verifikasi



Rika Kantini, ST., M.Si
NIP. 19770601 201001 2 005

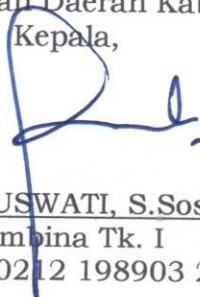
Mengetahui,

Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Kepala,



Ir. INE INAJAH, MSE., M.Sc
Pembina Tk.I
NIP. 19690315 199901 2 001

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kab. Sumedang
Kepala,



Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690212 198903 2 005

FORMAT PENGENDALIAN
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : *Bpkad*

NO	URAIAN	KESESUAIAN		CATATAN/TINDAK LANJUT
		ADA	TIDAK ADA	
1	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021		✓	
2	Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017:			
BAB I PENDAHULUAN				
	1.1. Latar Belakang	✓		TAMBAHAN CATATAN PELAKSANAAN YANG MENYASAPI PELAKSANAAN PERUBAHAN
	1.2. Landasan Hukum	✓		ditambah bahan & pasal 90.
	1.3. Maksud dan Tujuan	✓		
BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II				
	2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	✓		ditambah di program, sub sub. terapan & tdk terapan
	2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II	✓		alasan. kurang program, sub sub tdk terapan alasan
	2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	✓		
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
BAB IV PENUTUP				
3	Tabel-tabel:	✓		TAMBAHAN CATATAN PELAKSANAAN RENCANA TAHUN LANJUT
	Tabel 2.1. Evaluasi Renja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II	✓		Sesuai
	Tabel 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 (Hasil Input SIPD)	✓		Per SIPD → Renja
	Tabel 3.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 (Rekap Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Sub Kegiatan)			

Per 2020 *Per 2021*
target *target*
60 *50*
20 *16*

20 *17*

TIM VERIFIKASI

[Signature]

[Name]

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2021

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh tiga Bulan september tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 yang dihadiri Tim Penyusun, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah, *terlampir*.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

<i>Kesatu</i>	:	Sistematika Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah memuat: 1) program, kegiatan dan sub kegiatan; 2) lokasi kegiatan; 3) indikator kinerja; dan 4) pagu indikatif dan prakiraan maju;
<i>Kedua</i>	:	Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 202 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dengan prakiraan target Tahun 2022 yang diestimasikan;
<i>Ketiga</i>	:	Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 yang telah diverifikasi akan dijadikan lampiran Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Sub Bagian Program



YOSEP DEDE SULAEMAN, SS., M.Si
NIP. 19790511 201001 1 002

Tim Verifikasi



Rika Kantini, ST., M.Si
NIP. 19770601 201001 2 005

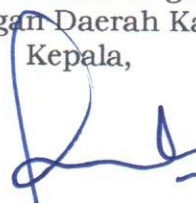
Mengetahui,

Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Kepala,



Ir. INE INAJAH, MSE., M.Sc
Pembina Tk.I
NIP. 19690315 199901 2 001

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kab. Sumedang
Kepala,



Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690212 198903 2 005



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 800/Kep.005/BPKAD/2021
LAMPIRAN : 13 (tiga belas) lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
 - c. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, maka diperlukan perubahan Anggota Tim Pelaksana Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 990/Kep. /BPKAD/2021 tentang Penunjukan Unsur Pengelola Kegiatan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai tugas yaitu:

Ketua :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD, Menyusun DPA-SKPD dan menyusun RKA-SKPD.
- c. Mengesahkan dan menandatangani Renja dan Renja Perubahan SKPD;
- d. Mengendalikan Rapat Pra Forum dan Forum SKPD.
- e. Memeriksa LAKIP , LPPD , LKPJ Laporan Capaian Kinerja , SPIP dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Sekretaris :

- a. Memverifikasi RKA , DPA SKPD dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Memverifikasi Renja dan Renja Perubahan SKPD;
- c. Memimpin diskusi Pra Forum dan Forum SKPD.
- d. Membuat Konsep LAKIP , LPPD , LKPJ Laporan Capaian Kerja, SPIP dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Anggota :

- a. Menyusun RKA, DPA SKPD dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Menyusun Renja dan Renja Perubahan SKPD;
- c. Membuat konsep paparan Kepala Badan;
- d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan data Pra Forum dan Forum SKPD;
- e. Membantu Membuat konsep LAKIP , LPPD , LKPJ Laporan Capaian Kinerja, SPIP dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- f. Menyusun laporan hasil Kegiatan

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Penyesuaian Perencanaan dan Penganggaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2021

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG, /



Ir. INE INAJAH, MSE, M.Sc

LAMPIRAN VI : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

NOMOR : 800/Kep. ~~DA~~ /BPKAD/2021.

TANGGAL : 11 Januari 2021

TENTANG : Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Penyusunan Renja Perubahan SKPD.

No.	N A M A	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Ir. INE INAJAH, MSE, M.Sc	19690315 199901 2 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua
2.	SONDJAJA, S.Sos, MM	19711214 199503 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris
3.	MIA ROHMIATIN. S, S.STP, M.Si	19855060 200412 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Anggota
4.	SUSANTI, SE, M.Si	19721219 199703 2 004	Pembina (IV/a)	Anggota
5.	Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH, M.Si	19690820 198903 2 003	Pembina (IV/a)	Anggota
6.	Drs. H. DADANG RUKMAWAN, M.Kes	19630301 198302 1 002	Pembina Tk.I (IV/b)	Anggota
7.	Dra. Hj. KUMALA HERMAWATI	19650405 199403 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
8.	SARI AYU DIANTINI, SE, MM	19820510 200902 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
9.	TUTI HERMAWATI, SE	19751005 200701 2 011	Penata (III/c)	Anggota
10.	IDRIS DARWANTO, SM	-	-	Anggota
11.	REGINA WIDYA UTAMI, SE, MM	-	-	Anggota
12.	JAJANG WIJANA, SE	-	-	Anggota
13.	RAGIL DWIGUNA, S.Kom	-	-	Anggota
14.	RITA YULIAN	-	-	Anggota
15.	DEBBY. A YUKORURI, SE	-	-	Anggota
16.	ANIS SAJIDIN, SE	-	-	Anggota
17.	BUDI SULISTIA, SE	-	-	Anggota

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ir. INE INAJAH, MSE, M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta hidayah-nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kinerja BPKAD Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja ini di susun untuk memberikan gambaran tentang rencana kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerja BPKAD yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) BPKAD Tahun 2018-2023.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2021. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Sumedang, September 2021

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang



Ir. INE INAJAH., MSE., M.Sc

Pembina Tk. I

NIP. 196903151999012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	8
2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II	24
2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB IV PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Renja Sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun 2021	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD	26
Tabel 3.1	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	30
Tabel 3.2	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020. Tentang Perubahan RKPD tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan Perangkat Daerah.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2021 dilakukan Perubahan Renjaas BPKAD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan BPKAD.

Adapun alasan mendasar dilakukannya Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 adalah:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan; dan
3. Adanya pergeseran anggaran antar program, kegiatan, sub kegiatan maupun antar jenis belanja.

Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2018-2023 yang berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 terutama untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BPKAD Tahun Anggaran 2021.

Perubahan Renja BPKAD yang dimana didasari terkait perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang serta perubahan Renstra BPKAD. Dan pada akhir tahun 2019 di Indonesia terjadi pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Sumedang pertama kali mengumumkan kasus PDP pada tanggal 22 Maret 2020.

Seiring dengan ditetapkannya intruksi presiden tentang Refocusing kegiatan serta realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19. Serta terbitnya Permendagri 90 tahun 2019. Yang mengubah permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang Standar penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dan berdampak pada program, kegiatan, sub kegiatan dari sisi pelaksanaan kegiatan dan jumlah program, kegiatan pada skpd.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
21. Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Covid- 19
27. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah* Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
39. Peraturan Daerah Prov Jabar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
44. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
49. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
51. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor)
52. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang

- Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 111);
53. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 57);
 54. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 97);
 55. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 56. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 57. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati NomorTahun tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.
 58. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup No ... Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; dan
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.

BAB II

EVALUASI RENJA BPKAD

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang nomor 26 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang harus menjadi koordinator bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sehingga tercipta tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang diinginkan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, maka perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, agar kualitas pelayanan semakin baik.

Analisa kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Tahun 2021 Triwulan II (dua) di BPKAD terdiri dari dua Program diantaranya Program pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dari dua program tersebut terdiri dari 6 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Untuk kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang terdiri dari 11 Sub kegiatan capaian kinerja masih dibawah 50% dikarenakan aktivitas Sub kegiatan tersebut dilaksanakan di Triwulan III (tiga) dan Triwulan IV (empat), Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terdiri dari 7 Sub Kegiatan untuk capaian kinerja sebagian sudah tercapai dikarenakan pada sub kegiatan tersebut merupakan aktivitas bulanan. Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari 11 Sub Kegiatan untuk capaian kinerja sebagian sudah tercapai dikarenakan pada sub kegiatan tersebut merupakan aktivitas bulanan. Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari 3 Sub kegiatan. Kegiatan ini yang tahun kemarin merupakan kegiatan PPKD yang dimana aktivitasnya diatur oleh ketentuan dari pusat. Dan kegiatan ini merupakan bantuan keuangan desa, dana desa, bagi hasil serta dana darurat.

Kegiatan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan. Kegiatan ini tidak dilaksanakan di karenakan refocusing kegiatan. Kegiatan pengelolaan Barang milik daerah yang terdiri dari 13 Sub kegiatan capaian kinerja masih dibawah 50% dikarenakan aktivitas Sub kegiatan tersebut dilaksanakan di Triwulan III (tiga) dan Triwulan IV (empat).

Untuk evaluasi Triwulan II (dua) Tahun 2021 ada enam sub kegiatan yang tidak dilaksanakan di karenakan ada refocusing sub kegiatan sehingga sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Triwulan II (dua) Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-2)	Target Kinerja Renja Tahun 2020 (n-1)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II (dua) Tahun 2020		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2020	
						Realisasi Kinerja Renja 2020	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah							
	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	8	0	0	0	0	8	100
	Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	8	0	0	0	0	4	50
	Sinegritas Perencanaan Penyusunan Anggaran	Jumlah Tim Verifikator	20	0	0	0	0	0	0

			Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	2	0	0	0	0	2	100
			Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	56	0	0	0	0	56	100
			Penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	1	0	0	0	0	1	100
			Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Murni	1	0	0	0	0	1	100
			Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	56	0	0	0	0	56	100
			Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	2	0	0	0	0	2	100
			Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	56	0	0	0	0	0	0,00
			Asistensi DPPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	56	0	0	0	0	0	0
			Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	3	0	0	0	0	3	100
			Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	Buku Saku Murni dan Perubahan	3	0	0	0	0	3	100

			Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi	56	0	0	0	0	56	100
			Peningkatan Kapasitas TAPD	Jumlah TAPD	20	0	0	0	0	0	0
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	2	0	0	0	0	2	100
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	1	0	0	0	0	1	100
			Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	2	0	0	0	0	2	100
			Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	112	0	0	0	0	112	100
			Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	2	0	0	0	0	2	100
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	56	0	0	0	0	56	100
			Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	56	0	0	0	0	56	100
			Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengesahan	3360	0	0	0	0	0	0
			Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	2	0	0	0	0	2	100

				Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	0	0	0	0	2	100
				Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	0	0	0	0	1	100
				Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis Akrua	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	1	0	0	0	0	1	100
				Sinegritas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	56	0	0	0	0	56	100
				Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	Jumlah Dokumen LRA	36	0	0	0	0	36	100
				Penyusunan RKBMD dan RKPBM	Jumlah SKPD yang dikelola	4	0	0	0	0	4	100
				Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	2	0	0	0	0	2	100
				Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	112	0	0	0	0	112	100
				Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	112	0	0	0	0	112	100

				Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	2	0	0	0	0	2	100
				Identifikasi Belanja Modal SKPD	Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	1	0	0	0	0	1	100
				Pengelolaan Sistem Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	1	0	0	0	0	1	100
				Inventarisasi Aset	Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	4	0	0	0	0	0	0
				Penyusunan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu	4	0	0	0	0	0	0

Penjelasan realisasi yang kurang dari 100% pada kegiatan tersebut diatas adalah:

1. Verifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang penjabaran APBD, dengan target 8 dokumen dan realisasi kegiatan 4 kegiatan ini hanya terrealisasi 4 dokumen disebabkan Refocusing anggaran sehingga target output dialihkan ke kegiatan lainnya. Sehingga target tersebut masih tercapai.
2. Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran dengan target 20 SKPD dan realisasi kegiatan 0, kegiatan ini tidak dilaksanakan disebabkan tidak di danai.
3. Asistensi RKA SKPD/ PPKD Perubahan APBD, dengan target 56 SKPD dan realisasi kegiatan tidak ada disebabkan refocusing sehingga output dialihkan ke kegiatan Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD.
4. Validasi pengesahaan Pertanggungjawaban kegiatan target 3360 dokumen dan realisasi 0 (nol), disebabkan kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak di danai.
5. Inventarisasi aset dengan target 4 dokumen dan belum ada realisasi dikarenakan kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2021.
6. Penyusunan Neraca Aset dengan target 4 dokumen dan belum ada realisasi dikarenakan kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-2)	Target Kinerja Renja Tahun 2021 (n-1)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II (dua) Tahun 2021		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021	
						Realisasi Kinerja Renja 2021	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen pengendalian Anggaran							
		Dokumen Perencanaan Penganggaran							
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	6		2	-	0	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	6		2	-	0	0	0,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Validasi RKA SKPD	3		1	-	0	0	0,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Validasi Perubahan RKA SKPD	3		1	1	100	1	33,33
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Validasi DPA SKPD	3		1	-	0	0	0,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Validasi Perubahan DPA SKPD	3		1	-	0	0	0,00

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD	6		2	2	100	2	33,33
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	18		6	3	50	3	16,67
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan	12		4	-	0	0	0,00
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendapatan	3		1	-	0	0	0,00
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Belanja Daerah	3		1	-	0	0	0,00
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pembiayaan	1		1	-	0	0	0,00
				Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Perencanaan Penganggaran DAerah	2			-		0	0,00

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah							
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6		2	1	50	1	16,67
				Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Validasi RAK Murni dan Perubahan, Jumlah prakiraan pengeluaran kas daerah dan jumlah penerbitan SPD	6		2	1	50	1	16,67
				Koordinasi, Fasilitasi. Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi Laporan Konfirmasi Transfer /rekonsiliasi dana spesifik dan penyaluran dana spesifik (DAU)	9		3	3	100	3	33,33
				Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah koordinasi pelaksanaan transaksi non tunai	3		1		0	0	0,00

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6		2	1	50	1	16,67
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Buku Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	3		1	1	100	1	33,33
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Penatausahaan	3		1	1	100	1	33,33
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah							
					Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran							
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Register Penerimaan dan Register Pengeluaran	6		2	1	50	1	16,67

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	9		3	2	66,67	2	22,22
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan LRA Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3		1	-	0	0	0,00
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Unaudited dan Audited	12		4	2	50	2	16,67
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda LPP APBD dan Perbub LPP APBD	12		4	2	50	2	16,67
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Tindak lanjut BPK	3		1	1	100	1	33,33
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Tim Majelis TGR	2		-	-	0	0	0,00
				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Analisa Laporan Keuangan Pemda	3		1	-	0	0	0,00
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi dan Buku Perbup Bagan Akun Standar	6		2	-	0	0	0,00

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup Sisdur Akuntansi	3		1	1	100	1	33,33
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan Akuntansi	3		1	1	100	1	33,33
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan BLUD	2			-	0	0	0,00
				Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	6		2	-	0	0	0,00
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Penyaluran Bantuan Keuangan	6		2	1	50	1	16,67

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen Dana Darurat dan Mendesak	6		2	1	50	1	16,67
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Dana Bagi hasil	12		4	2	50	2	16,67
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data lingkup keuangan daerah							
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Jumlah Coustum dalam Sistem	3		0	0	0	0	0,00
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)							
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah							
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah SSH	3		1	1	100	1	33,33
				Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Jumlah Standar Barang Kebutuhan Barang Milik Daerah	6		2	-	0	0	0,00

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPBMMD	6		2	2	100	2	33,33
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12		4	-	0	0	0,00
				Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	12		4	-	0	0	0,00
				Inventarisasi barang Milik daerah	Jumlah Inventarisasi BMD	6		2	-	0	0	0,00
				Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah BMD yang diamankan	3		1	-	0	0	0,00
				penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BA Penilaian BMD	6		2	-	0	0	0,00
				Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BA Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan BMD	6		2	-	0	0	0,00
				Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Jumlah optimalisasi Penggunaan	9		3	-	0	0	0,00
				Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	penyusunan BA Rekonsiliasi BMD	3		1	-	0	0	0,00
				Penyusunan Laporan Barang milik daerah	Jumlah Penetapan Stastus pengguna barang	3		1	-	0	0	0,00

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
				pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan BMD	3		1	-	0	0	0,00

Penjelasan realisasi pada kegiatan tersebut diatas adalah:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan 12 Sub Kegiatan Target kinerja Belum Tercapai disebabkan pelaksanaan dan aktivitas pada setiap sub Kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan ke IV tahun 2021.
2. Kegiatan dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan 7 Sub Kegiatan target kinerja sebagian sudah tercapai dan target capaian sebagian dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2021
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan 12 Sub Kegiatan sebagian Target setiap sub kegiatan sebagian sudah dilaksanakan dan sisa target akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2021
4. Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 3 Sub Kegiatan sebagian sudah terrealisasi dan Sisa dari target baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2021
5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan 1 Sub Kegiatan, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran.
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 12 Sub Kegiatan Target kinerja Belum Tercapai disebabkan pelaksanaan dan aktivitas pada setiap sub Kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan ke IV tahun 2021.

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II (dua)

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu Perangkat Daerah yang akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil atau keluaran dari program atau kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan atau program atau kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Evaluasi Program dan Kegiatan pada tahun 2020 target kinerja tercapai walaupun terjadi refocusing anggaran dan terjadi pandemi Covid-19 target kinerja yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mulai dari target sasaran, Program dan Kegiatan sepenuhnya tercapai. Dan untuk Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Tahun 2021 Triwulan II (dua) di BPKAD terdiri dari dua Program diantaranya Program pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dari dua program tersebut terdiri dari 6 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Untuk kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang terdiri dari 11 Sub kegiatan capaian kinerja masih dibawah 50% dikarenakan aktivitas Sub kegiatan tersebut dilaksanakan di Triwulan III (tiga) dan Triwulan IV (empat), Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terdiri dari 7 Sub Kegiatan untuk capaian kinerja sebagian sudah tercapai dikarenakan pada sub kegiatan tersebut merupakan aktivitas bulanan. Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari 11 Sub Kegiatan untuk capaian kinerja sebagian sudah tercapai dikarenakan pada sub kegiatan tersebut merupakan aktivitas bulanan. Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari 3 Sub kegiatan. Kegiatan ini yang tahun kemarin merupakan kegiatan PPKD yang dimana aktivitasnya diatur oleh ketentuan dari pusat. Dan kegiatan ini merupakan bantuan keuangan desa, dana desa, bagi hasil serta dana darurat. Kegiatan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan.

Kegiatan ini tidak dilaksanakan di karenakan refocusing kegiatan. Kegiatan pengelolaan Barang milik daerah yang terdiri dari 13 Sub kegiatan capaian kinerja masih dibawah 50% dikarenakan aktivitas Sub kegiatan tersebut dilaksanakan di Triwulan III (tiga) dan Triwulan IV (empat) tahun 2021.

Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran Perangkat Daerah, yang tertuang dalam sasaran setiap tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023, yaitu:

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas."

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 dalam rangka pencapaian Tujuan di atas ditetapkan dalam sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023, pada tahun 2021 telah melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021. Secara lengkap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2021 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Capaian					Realisasi Capaian Triwulan II					Proyeksi
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	WTP
2	APBD Tepat Waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	Tepat Waktu
3	Nilai Sakip			B	BB	A	A	AA	B	BB	BB	-	-	AA
4	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah			96,15	96,25	96,50	97	97,10	95,85	91,17	18,85			97,10
5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1
6	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi			65	70	75	80	85	56	82	-	-	-	85

2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan dan aset daerah termasuk juga penyelesaian keuangan dan aset desa, Isu-isu strategis/ permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3
ISU STRATEGIS DALAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

No	Aspek	Permasalahan	Isu- isu strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah; 2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran; 3. Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja. 	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Anggaran
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya; 2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD; 3. Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban; 4. Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran; 5. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian; 	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pengajuan Pembayaran

3.	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi; 2. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset. 	Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD
4.	Permasalahan dalam Bidang Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum; 2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi. 	Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah

Dari tabel 2.3 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dokumen anggaran;
2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran;
3. Masih rendahnya kualitas pelaporan keuangan OPD;
4. Masih rendahnya kualitas penatausahaan aset daerah

Dari keempat isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah **Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.**

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD TAHUN 2021

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini:

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5020114	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	17 Dokumen	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	100,000,000	
5020115	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	17 Dokumen	20,000,000	20,000,000		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	100,000,000	
5020116	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 Persen	17 Dokumen	120,000,000	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	80,000,000		
50202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											144,562,793,748	142,473,873,552				89,576,351,636	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5021201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	100 Persen	12 Laporan	144,412,793,748	142,240,953,552	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	89,461,351,636	
5021207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100 Persen	18 Dokumen	18 Dokumen	100 Persen	12 Laporan	150,000,000	232,920,000		Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	115,000,000	
50213	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												154,160,000	153,060,000			200,000,000	
502132	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Sewa Tempat Arsip	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Paket	1 Paket		12 Laporan	154,160,000	153,060,000		Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	200,000,000	
50214	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												75,000,000	0			120,000,000	
502143	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			75,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH			120,000,000	
50215	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												233,580,000	434,340,000			390,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
50201520	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	100 Stel	100 Stel		12 Laporan	0	92,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	120,000,000
50201530	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen		12 Laporan	30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	60,000,000
50201540	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen		12 Laporan	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	40,000,000
50201550	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen		12 Laporan	25,000,000	65,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	50,000,000
50201590	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Peserta Dilat	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	5 Orang	5 Orang		12 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	60,000,000
50201511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	65 Orang	65 Orang		12 Laporan	158,580,000	225,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	60,000,000
502016	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,459,809,000	1,504,359,000			2,394,392,850	
5020161	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	12 Laporan	30,000,000	26,716,000		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	264,500,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
502162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Persen	66 Jenis 11 Jenis	66 Jenis 11 Jenis	100 Persen	12 Laporan	295,399,000	215,139,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	339,708,850	
502163	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	12 Laporan	50,000,000	48,992,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	60,000,000	
502164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Persen	8 Jenis 12 Bulan	8 Jenis 12 Bulan	100 Persen	12 Laporan	187,420,000	196,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	184,000,000	
502165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Persen	18 Jenis	18 Jenis	100 Persen	12 Laporan	280,000,000	225,081,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	375,084,000	
502166	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Persen	19 Surat Kabar	19 Surat Kabar	100 Persen	12 Laporan	36,000,000	36,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	41,400,000	
502169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Persen	63 Kali	63 Kali	100 Persen	12 Laporan	505,990,000	672,121,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	1,009,700,000	
502160	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Arsip yang dikelola	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	12 Laporan	25,000,000	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	60,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5020161	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Website Yang di Pelihara	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	12 Laporan	50,000,000	49,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	60,000,000	
50217	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											727,040,000	743,100,000			9,660,000,000		
502171	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Paket	6 Paket				0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH			5,000,000,000	
502172	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Paket	6 Paket				0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH			4,000,000,000	
502175	Pengadaan Mebel		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket	00				250,000,000	372,860,000				260,000,000	
502176	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket	1 Paket				477,040,000	370,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			400,000,000	
50218	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,064,560,000	2,143,410,000			1,101,884,000		
502182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	12 Laporan	586,200,000	503,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	857,900,000		
502184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Jasa Kebersihan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	12 Laporan	1,478,360,000	1,640,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	243,984,000		
50219	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											815,489,000	1,119,609,000			1,163,827,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
50201920	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara					89 % 100 Persen	58 Kendaraan dinas	58 Kendaraan dinas	100 Persen	12 Laporan	275,000,000	260,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	89 % 100 Persen	317,009,000
50201950	Pemeliharaan Mebel	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			89 % 100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	12 Laporan	15,000,000	13,000,000		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	89 % 100 Persen	30,000,000
50201960	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			89 % 100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	12 Laporan	98,160,000	101,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	89 % 100 Persen	100,000,000
50201990	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Gedung Dipelihara					89 % 100 Persen	1 Kali	1 Kali	100 Persen	12 Laporan	52,329,000	51,929,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	89 % 100 Persen	556,784,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
50202010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung yang dipelihara Jumlah Penunjang Peralatan Kantor/Gedung yang dipelihara	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			89 % 100 Persen	1 Unit 448 unit	1 Unit 448 unit	100 Persen	12 Laporan	375,000,000	693,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	89 % 100 Persen	160,034,000	
5022	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												395,238,169,000	473,523,931,391		414,937,483,729		
50221	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												2,294,433,000	2,930,900,875		3,636,066,694		
502211	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	Dokumen Pengendalian, Dokumen Perencanaan Penganggaran			100 Persen 94 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	23 Dokumen	206,375,000	256,395,000		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 94 Persen	369,150,000	
502212	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	Dokumen Pengendalian, Dokumen Perencanaan Penganggaran			100 Persen 94 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	23 Dokumen	155,740,000	190,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 94 Persen	327,060,000	
502213	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Pengendalian, Dokumen Perencanaan Penganggaran			100 Persen 94 Persen	56 SKPD	56 SKPD	6 Dokumen	23 Dokumen	136,830,000	218,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 94 Persen	213,555,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
502020104	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Pengendalian, Dokumen Perencanaan Penganggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen 94 Persen	56 SKPD dan PPKD	56 SKPD dan PPKD	6 Dokumen	23 Dokumen	132,430,000	133,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 94 Persen	140,000,000			
502020105	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Pengendalian, Dokumen Perencanaan Penganggaran			100 Persen 94 Persen	56 SKPD	56 SKPD	6 Dokumen	23 Dokumen	170,630,000	203,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 94 Persen	239,890,000			
502020106	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Pengendalian, Dokumen Perencanaan Penganggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen 94 Persen	56 SKPD dan PPKD	56 SKPD dan PPKD	6 Dokumen	23 Dokumen	133,690,500	181,820,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 94 Persen	180,000,000			
502020107	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	1. Jumlah Dokumen APBD Murni 2. Jumlah Hasil Evaluasi	Dokumen Pengendalian, Dokumen Perencanaan Penganggaran			100 Persen 94 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	23 Dokumen	109,305,000	440,405,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 94 Persen	488,750,000			
502020108	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	1. Jumlah Dokumen APBD Perubahan 2. Jumlah Dokumen Perubahan APBD 3. Jumlah Dokumen APBD Perubahan 4. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen Pengendalian, Dokumen Perencanaan Penganggaran			100 Persen 94 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	23 Dokumen	432,995,000	441,045,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 94 Persen	533,025,000			
502020109	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	Dokumen Pengendalian, Dokumen Perencanaan Penganggaran			100 Persen 94 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	23 Dokumen	323,054,150	530,360,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 Persen 94 Persen	533,226,250			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
502020206	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		92 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen		38,710,500	38,710,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	92 Persen	50,000,000		
502020207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah			92 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen		495,602,500	429,557,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	92 Persen	69,230,000		
502020208	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Buku Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Jumlah Dokumen BKU Pembiayaan Jumlah SKPD Peserta Bimtek	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah			92 Persen	1 Dokumen 12 Dokumen 55 SKPD	1 Dokumen 12 Dokumen 55 SKPD	1 Dokumen	12 Dokumen		47,578,500	64,243,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	92 Persen	153,333,333		
502020209	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	jumlah Peserta Bimtek	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		92 Persen	55 SKPD	55 SKPD	1 Dokumen	12 Dokumen		140,178,000	188,678,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	92 Persen	50,000,000		
502020210	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah												959,783,950	1,376,573,850				2,032,791,605		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
502020301	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Buku Register Penerimaan Daerah, Buku Pengeluaran Daerah, dan perhitungan Silva	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran		92 % 92 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	52,516,100	52,516,100		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92 % 92 Persen	339,152,365		
502020302	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Berita Acara Rekonsiliasi LRA, Neraca, LO, LPE, Kertas Kerja Perbandingan LRA dan LO, Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap, Kertas Kerja Perbandingan Neraca	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran		92 % 92 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	75,799,500	75,799,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92 % 92 Persen	160,665,235		
502020303	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	LRA Bulanan, Triwulanan, Semesteran hasil konsolidasi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran		92 % 92 Persen	11 Dokumen	11 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	114,619,600	114,619,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92 % 92 Persen	82,653,662		
502020304	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Laporan Keuangan Pemda Unaudited dan Audited	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran		92 % 92 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	119,874,900	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92 % 92 Persen	252,997,700		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
50202305	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan APBD (Raperda, Perda, Raperbup, Perbup)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran			92 % 92 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	106,444,000	106,444,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92 % 92 Persen	168,565,304					
50202306	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK dan Kertas Kerja Jumlah Hasil Koreksi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran			92 % 92 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	9,168,250	9,168,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92 % 92 Persen	29,632,914					
50202307	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Laporan Tim Majelis TGR	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		92 % 92 Persen		1 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	0	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92 % 92 Persen	60,000,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
50220308	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Buku Analisa Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran		92 % 92 Persen	1 Buku	1 Buku	2 Dokumen	6 Dokumen		56,737,200	56,737,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92 % 92 Persen	47,130,450					
50220309	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Buku Kebijakan Akuntansi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran		92 % 92 Persen	1 Buku	1 Buku	2 Dokumen	6 Dokumen		95,352,800	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92 % 92 Persen	142,520,650					
50220300	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Buku Sisdur Akuntansi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran		92 % 92 Persen	1 Buku	1 Buku	2 Dokumen	6 Dokumen		11,289,200	11,289,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92 % 92 Persen	44,916,700					
50220301	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Peserta Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran		92 % 92 Persen	55 Petugas Akuntansi	55 Petugas Akuntansi	2 Dokumen	6 Dokumen		261,490,900	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92 % 92 Persen	544,556,625					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.000.000.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.000.000.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
502232	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran		92 % 92 Persen	2 Dokumen	6 Dokumen	0	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92 % 92 Persen	110,000,000					
502233	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 % 92 Persen	2 Buku	2 Buku	2 Dokumen	6 Dokumen	56,491,500	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92 % 92 Persen	50,000,000			
50224	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								390,731,730,000	468,051,024,666			408,658,372,097					
502248	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		0 0	1 Tahun 100 %	1 Tahun 100 %	12 Dokumen	354,295,727,300	354,295,727,300	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	0 0	376,658,372,097					
502249	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	1 Tahun	1 Tahun	12 Dokumen	6,808,750,000	84,128,044,666	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	0 0	2,000,000,000					
502240	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	1 Tahun	1 Tahun	12 Dokumen	29,627,252,700	29,627,252,700	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	0 0	30,000,000,000					
50225	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								68,574,050	0			80,000,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
50202020502	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui		Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen dan sistem	1 Dokumen dan sistem				68,574,050	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH			80,000,000			
50203	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH												1,629,181,000	2,459,681,000			2,564,448,924					
502031	Pengelolaan Barang Milik Daerah												1,629,181,000	2,459,681,000			2,564,448,924					
5020311	Penyusunan Standar Harga	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Dokumen Standar Harga	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26 Dokumen	350,000,000	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89 %	100,000,000				
5020312	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26 Dokumen	50,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89 %	100,000,000				
5020313	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah			89 %	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	26 Dokumen	20,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89 %	86,250,000				
5020314	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89 %	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	26 Dokumen	70,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89 %	100,000,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
502315	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Jumlah Dokumen Identifikasi BMD 2. Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui 3. Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu 4. Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah			89 %	58 Dokumen dan BAR	58 Dokumen dan BAR	1 Dokumen	26 Dokumen	140,000,000	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89 %	472,320,174				
502316	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset (pemantauan dan pengamanan)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah			89 %	1 Dokumen dan sistem	1 Dokumen dan sistem	1 Dokumen	26 Dokumen	50,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89 %	205,562,500				
502317	Pengamanan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah			89 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26 Dokumen	309,681,000	709,681,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89 %	476,502,500				
502318	Penilaian Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Jumlah Dokumen Money SKPD 2. Dokumen penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah			89 %	3 Dokumen dan sistem	3 Dokumen dan sistem	1 Dokumen	26 Dokumen	155,000,000	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89 %	172,500,000				
502319	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Database barang milik daerah yang teregister 2. Dokumen berita acara pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah			89 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26 Dokumen	79,500,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89 %	230,000,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
502310	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Dokumen penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah			89 %	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	26 Dokumen	145,000,000	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89 %	57,500,000			
502311	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah			89 %	54 Berita Acara	54 Berita Acara	1 Dokumen	26 Dokumen	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89 %	138,000,000			
502312	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26 Dokumen	20,000,000	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89 %	120,000,000			
502313	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	1. Jumlah SKPD Peserta Bimtek 2. Jumlah pengelola barang milik daerah yang dibina	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah			89 %	55 SKPD	55 SKPD	1 Dokumen	26 Dokumen	140,000,000	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89 %	305,813,750			
TOTAL												547,279,781,748	624,922,563,943				1,003,953,846,320			

Tabel 3.2
Rencana Kerja dan Pendanaan Pada Perubahan Renja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2021

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2021						Keterangan
									Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)				
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
5	02					KEUANGAN									
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	94%	94%	904.415.000	1.328.135.000	423.720.000,00		
							Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100%	100%	1.388.018.000	1.602.765.875	214.747.875,00		
5	02	02					Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	92%	92%	391.915.378.000	468.987.723.266	77.072.345.266,00		
							Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	92%	92%	1.028.358.000	1.376.573.850	348.215.850,00		
5	02	02	2	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Dokumen pengendalian Anggaran	94%	9 Dok	904.415.000	1.328.135.000	423.720.000	Sedang Berjalan	
								Dokumen Perencanaan Penganggaran		14 Dok	1.388.018.000	1.602.765.875	214.747.875	214.747.875	Sedang Berjalan
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dok	2 Dok	206.375.000,00	256.395.000,00	50.020.000,00	Sedang Berjalan	
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dok	2 Dok	155.740.000,00	190.290.000,00	34.550.000,00	Sedang Berjalan	
5	02	02	2	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Validasi RKA SKPD	56 SKPD	1 Dok	136.830.000,00	218.730.000,00	81.900.000,00	Sedang Berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2021					Keterangan
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
5 02 02 2 01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Validasi Perubahan RKA SKPD	56 SKPD	1 Dok	132.430.000,00	133.630.000,00	1.200.000,00	Sedang Berjalan
5 02 02 2 01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Validasi DPA SKPD	56 SKPD	1 Dok	170.630.000,00	203.860.000,00	33.230.000,00	Sedang Berjalan
5 02 02 2 01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Validasi Perubahan DPA SKPD	56 SKPD	1 Dok	133.690.500,00	181.820.500,00	48.130.000,00	Sedang Berjalan
5 02 02 2 01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD Murni, dan Jumlah Hasil Evaluasi	Jumlah Dokumen APBD	2 Dok	2 Dok	109.305.000,00	440.405.000,00	331.100.000,00	Sedang Berjalan
5 02 02 2 01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan dan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	2 Dok	6 Dok	432.995.000,00	441.045.000,00	8.050.000,00	Sedang Berjalan
5 02 02 2 01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan	3 Dok	4 Dok	323.054.150,00	530.360.150,00	207.306.000,00	Sedang Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2021					Keterangan
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
5 02 02 2 01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Tim Verifikator	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendapatan	4 SKPD	1 Dok	91.683.350,00	-	(91.683.350,00)	Sedang Berjalan
5 02 02 2 01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi Belanja Daerah		1 Dok	363.100.000,00	334.365.225,00	(28.734.775,00)	Sedang Berjalan
5 02 02 2 01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Koordinasi Pembiayaan		1 Dok	36.600.000,00	-	(36.600.000,00)	Sedang Berjalan
5 02 02 2 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	92%	12 Dok	1.183.648.000	936.698.600	(246.949.400,00)	Sedang Berjalan
5 02 02 2 2 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Berita Acara Rekon, Jumlah Dokumen Kas Daerah	Jumlah buku kas umum daerah, dokumen perhitungan silpa	4 Dok	2 Dok	306.672.900,00	85.200.000,00	(221.472.900,00)	Sedang Berjalan
5 02 02 2 2 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Surat Pencairan Dana (SPD)	Jumlah Validasi RAK Murni dan Perubahan dan jumlah penerbitan SPD	275 SPD	2 Dok	62.761.000,00	100.000.000,00	37.239.000,00	Sedang Berjalan

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2021					Keterangan					
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)								
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan						
5	02	02	2	2	05	Koordinasi, Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Jumlah LKT, BAR Dana Transfer, Jumlah Dokumen Laporan Bankeu	Jumlah koordinasi Laporan Konfirmasi Transfer/rekonsiliasi dana spesifik dan penyaluran dana spesifik (DAU)	12 Dok	3 Dok	92.144.600,00	92.144.600,00	-	Sedang Berjalan
5	02	02	2	2	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah koordinasi pelaksanaan transaksi non tunai		1 Dok	38.710.500,00	38.710.500,00	-	Sedang Berjalan
5	02	02	2	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Dok	2 Dok	495.602.500,00	300.400.000,00	(195.202.500,00)	Sedang Berjalan
5	02	02	2	2	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Buku Pedoman Pelaksana Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Buku Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	1 Dok	1 Dok	47.578.500,00	64.243.500,00	16.665.000,00	Sedang Berjalan
5	02	02	2	2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Penatausahaan	55 SKPD	1 Dok	140.178.000,00	256.000.000,00	115.822.000,00	Sedang Berjalan
5	02	02	2	3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	2 Dok	628.944.000	910.961.600	282.017.600	Sedang Berjalan
								Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran		4 Dok	330.839.950	465.612.250	134.772.300	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2021					Keterangan
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
5.02.02.2.3.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Buku Register Penerimaan Derah, Buku Pengeluaran Daerah dan SILPA	Jumlah Register Penerimaan dan Register Pengeluaran	4 Dok	2 Jenis	52.516.100	52.516.100	-	Sedang Berjalan
5.02.02.2.3.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-Lo dan Beban	BAR LRA, Neraca, LO, LPE, Kertas Kerja Mutasi Aset, Kertas Kerja Perbandingan Neraca	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	7 Dok	3 Jenis	75.799.500	75.799.500	-	Sedang Berjalan
5.02.02.2.3.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulana, Triwulanan dan Semesteran	LRA Bulanan, Semesteran hasil Konsolidasi	Jumlah Laporan LRA Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	11 Dok	1 Jenis	114.619.600	114.619.600	-	Sedang Berjalan
5.02.02.2.3.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pemda Un audited dan Audited	Jumlah Laporan Keuangan Unaudited dan Audited	2 Dok	4 Dok	119.874.900	250.000.000	130.125.100,00	Sedang Berjalan
5.02.02.2.3.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Raperda, Perda, Raperbup, Perbup)	Jumlah Perda LPP APBD dan Perbub LPP APBD	4 Dok	4 Dok	106.444.000	106.444.000	-	Refocusing Kegiatan
5.02.02.2.3.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tanggapan/ Tindaklanjut LHP BPK dan Kertas Kerja Jurnal Hasil Koreksi	Jumlah Laporan Tindak lanjut BPK	2 Dok	1 Dok	9.168.250	9.168.250	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2021					Keterangan						
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)									
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan							
5	02	02	2	3	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah Laporan Tim Majelis TGR		1 Dok	-	50.000.000	50.000.000,00	Sedang Berjalan	
5	02	02	2	3	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Buku Analisa Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Analisa Laporan Keuangan Pemda	1 Buku	1 Dok	56.737.200	56.737.200	-	Sedang Berjalan	
5	02	02	2	3	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Buku Kebijakan Akuntansi	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi dan Buku Perbup Bagan Akun Standar	1 Buku	2 Buku	95.352.800	100.000.000	4.647.200,00	Sedang Berjalan	
5	02	02	2	3	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Buku Sisdur Akuntansi	Jumlah Perbup Sisdur Akuntansi	1 Buku	1 Buku	11.289.200	11.289.200	-	Sedang Berjalan	
5	02	02	2	3	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan Akuntansi	55 Petugas Akuntansi	55 SKPD	261.490.900	300.000.000	38.509.100,00	Sedang Berjalan	
5	02	02	2	3	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan BLUD		37 SKPD	-	100.000.000	100.000.000,00	Sedang Berjalan	
5	02	02	2	3	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Buku Profil Keuangan Daerah dan Buku Saku tentang P2 APBD	Jumlah Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	2 Buku	2 Dok	56.491.500	150.000.000	93.508.500,00	Sedang Berjalan	
5	02	02	2	3		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		94%	12 Dok	390.731.730.000	468.051.024.666	77.319.294.666,00	Sedang Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2021					Keterangan
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
5 02 02 2 3 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Penyaluran ADD, TMMD, UMKM, Jalan Desa, Penataan Sumber Mata Air, Penataan Lokasi Parkir, Renov Desa, Rambat Beton, Penataan Balai, Kapasitas Jalan, Perbaikan Jalan, Dana Desa	Jumlah Dokumen Penyaluran Bantuan Keuangan	9 Dok	2 Dok	354.295.727.300	354.295.727.300	-	Sedang Berjalan
5 02 02 2 3 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan BTT, Pembayaran Hutang Pasar, Penanganan Covid, DBHCHT	Jumlah Dokumen Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan	2 Dok	6.808.750.000	84.128.044.666	77.319.294.666,00	Sedang Berjalan
5 02 02 2 3 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Belanja Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Dana Bagi hasil	1 Laporan	4 Dok	29.627.252.700	29.627.252.700	-	Sedang Berjalan
5 02 02 2 5	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Persentase ketersediaan data lingkup keuangan daerah	92%	92%	68.574.050	-	(68.574.050,00)	Sedang Berjalan
5 02 02 2 5 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem yang Dipelihara	Jumlah Coustum dalam Sistem	1 Sistem	1 Pemeliharaan	68.574.050,00		830.500.000,00	Sedang Berjalan
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	89%	89%	1.629.181.000	2.459.681.000	830.500.000,00	
5 02 03 2 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	89%	26 Dok	1.629.181.000	2.459.681.000	830.500.000,00	
5 02 03 2 1 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	Jumlah SSH	1 Dok	1 Dok	350.000.000,00	350.000.000,00	-	Sedang Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2021					Keterangan
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
5 02 03 2 1 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan BMD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Jumlah Standar Barang Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dok	2 Dok	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	Sedang Berjalan
5 02 03 2 1 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah RKBMD dan RKPBM		2 Dok	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	Sedang Berjalan
5 02 03 2 1 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dok	4 Dok	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	Sedang Berjalan
5 02 03 2 1 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Identifikasi BMD, Sistem Pengelolaan Aset, Pelaporan BMD, Jumlah BAR	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	58 Dokumen BAR	4 Dok	140.000.000,00	140.000.000,00	-	Sedang Berjalan
5 02 03 2 1 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Aset Tanah	Jumlah Inventarisasi BMD	1 Dok	2 Dok	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	Sedang Berjalan
5 02 03 2 1 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemda	Jumlah BMD yang diamankan	1 Dok	1 Dok	309.681.000,00	709.681.000,00	400.000.000,00	Sedang Berjalan
5 02 03 2 1 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Monev SKPD, Penilaian dalam Rangka Pemanfaatan Barang	Jumlah BA Penilaian BMD	3 Dok	2 Dok	155.000.000,00	250.000.000,00	95.000.000,00	Sedang Berjalan
5 02 03 2 1 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Database BMD, Dokumen BAR atas Pemeriksaan	Jumlah BA Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan BMD	1 Dok	2 Dok	79.500.000,00	150.000.000,00	70.500.000,00	Sedang Berjalan
5 02 03 2 1 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian dalam Rangka Pemanfaatan BMD	Jumlah optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan	5 Dok	3 Dok	145.000.000,00	250.000.000,00	105.000.000,00	Sedang Berjalan
5 02 03 2 1 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah BAR	Jumlah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	54 BAR	1 Dok	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Sedang Berjalan
5 02 03 2 1 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Penetapan Status pengguna barang		1 Dok	20.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	Sedang Berjalan
5 02 03 2 1 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	Jumlah Pembinaan Pengelolaan BMD	55 SKPD	1 Dok	140.000.000,00	140.000.000,00	-	Sedang Berjalan

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2021 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Perangkat Daerah yang efektif, optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 mengacu pada Renja Tahun 2021 dan hasil evaluasi pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2021 serta permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/ acuan bagi BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsi. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari Perangkat Daerah dan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Sumedang, September 2021

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang



Ir. INE INAJAH., MSE., M.Sc
Pembina Utama Muda/ IV b
NIP. 196903151999012001